

**PERATURAN BUPATI BURU**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**KABUPATEN BURU**

**TAHUN ANGGARAN 2011**



## PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 01TAHUN 2011

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI BURU**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buru Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang- Undang No 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617), jo Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961) jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961 ) jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 );
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 );
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 8.469.302.700,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 364.272.065.479,62
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 25.901.964.800,00</u>

Jumlah Pendapatan

Rp. 398.643.332.979,62

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

i. Belanja Pegawai	Rp. 165.324.695.560,00
ii. Belanja Bunga	Rp. 650.212.193,73
iii. Belanja Hibah	Rp. 14.232.991.000,00
iv. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 7.635.000.000,00
v. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 8.584.750.000,00
vi. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 750.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp 197.177.648.753,73

b. Belanja Langsung

i. Belanja Pegawai	Rp. 33.115.875.020,00
ii. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 104.037.626.040,68
iii. Belanja Modal	<u>Rp. 77.990.211.242,09</u>

Jumlah Belanja Langsung Rp. 215.143.712.302,77

Jumlah Belanja Rp. 412.321.361.056,50

Surplus/(Defisit) (Rp. 13.678.028.076,88)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 30.095.962.000,00

b. Pengeluaran Rp. 8.763.076.923,12

Rp. 21.332.885.076,88

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 7.654.857.000,00

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

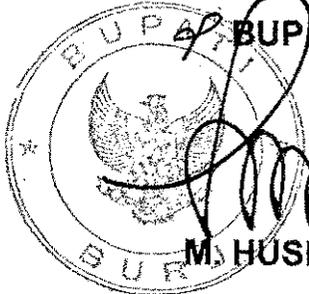
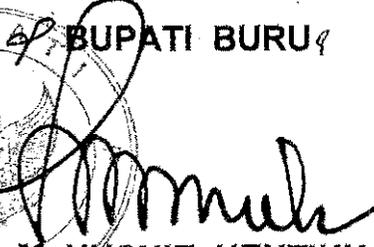
**Pasal 5**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 10 Januari 2011

 **BUPATI BURU**  
  
**M. HUSNIE HENTIHU**

Diundangkan di Namlea  
Pada tanggal 10 Januari 2011

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU**

 **SETDA**

**JUHANA A. SOEDRADJAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2011 NOMOR 01

**LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD**  
TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran I PERATURAN BUPATI BURU  
Nomor : 01 Tahun 2011  
Tanggal : 10 Januari 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH		
		1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>			<b>398.643.332.979,62</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			<b>8.469.302.700,00</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		1.668.300.000,00	
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah		4.068.950.500,00	
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yang Dipisahkan		380.952.200,00	
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		2.351.100.000,00	
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>		<b>364.272.065.479,62</b>	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		34.173.741.479,62	
1.2.2	Dana Alokasi Umum		274.961.724.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus		55.136.600.000,00	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>25.901.964.800,00</b>	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		4.151.870.000,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		21.750.094.800,00	
2	<b>BELANJA</b>		<b>412.321.361.056,50</b>	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>197.177.648.753,73</b>	
2.1.1	Belanja Pegawai		165.324.695.560,00	
2.1.2	Belanja Bunga		650.212.193,73	
2.1.4	Belanja Hibah		14.232.991.000,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial		7.635.000.000,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		8.584.750.000,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga		750.000.000,00	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>215.143.712.302,77</b>	
2.2.1	BELANJA PEGAWAI		33.115.875.020,00	
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		104.037.626.040,68	
2.2.3	BELANJA MODAL		77.990.211.242,09	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(13.678.028.076,88)</b>	
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>30.095.962.000,00</b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)		30.095.962.000,00	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>8.763.076.923,12</b>	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang		8.763.076.923,12	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>21.332.885.076,88</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>		<b>7.654.857.000,00</b>	

